



IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYALURAN BEASISWA ANAK ASUH EKS LOKALISASI DINAS SOSIAL KOTA SURABAYA

Endang Setyowati¹ • Nabilatun Nafisah² • Shinta Olivia Virnanda³

Abstract. *The Foster Child Scholarship Program for Former Localization Areas has been running for quite a long time, but in the implementation of the program, it is necessary to conduct an assessment to determine how the policy is implemented and the factors that influence its success. This program was created as a form of compensation by the Surabaya City Government for communities affected by the closure of localization areas. This study aims to analyze the distribution process of the Former Localization Scholarship and whether it has been effective for the community. This study uses a descriptive qualitative method by conducting in-depth interviews with the Social Service, recipients of the Former Localization Scholarship, observations, and documentation, as well as factual information analysis regarding the form of the policy implementation process of the Former Localization Scholarship in Surabaya. The results of the study indicate that the implementation of the Foster Child Scholarship Distribution Policy for Former Localization Areas at the Surabaya City Social Service has been carried out well; the program has clear targets and has been able to provide benefits for the beneficiaries. This study still found several obstacles in policy implementation, such as the limited understanding of some community members regarding the program mechanism, the utilization of assistance that has not been entirely in accordance with educational purposes, as well as the diverse social and economic conditions of the beneficiaries' families. This program no longer accepts new beneficiaries and only continues the policies that have been implemented previously, it is important to examine the implementation of the policy in its execution.*

Keywords: Policy Implementation, Former Localization Scholarship, Education.

©2026 Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

PENDAHULUAN

Prostitusi menjadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh seluruh dunia, Kegiatan prostitusi telah lama hadir dan menyebar luas dalam kehidupan Masyarakat. Secara etimologis, istilah prostitusi berasal dari kata prostitutio yang mengandung makna menawarkan atau menempatkan diri untuk dihadapkan kepada orang lain. Makna ini menggambarkan adanya tindakan memperjualbelikan diri dalam konteks tertentu. Fenomena ini tidak dapat dipandang secara sederhana karena hal tersebut berkaitan dengan kondisi sosial dan ekonomi, prostitusi berkembang melampaui batas

*Endang Setyowaty (✉)

-

Email : endangsetyowaty@gmail.com



wilayah dan budaya, yang menunjukkan bahwa persoalan ini memiliki sifat yang kompleks dan multidimensional (Sevrina, 2020). Di Indonesia praktik prostitusi sudah mulai muncul dari sejak masa penjajahan belanda, jepang hingga kemerdekaan indonesia, praktik prostitusi telah tercatat di beberapa kota besar. praktik ini mulai muncul dengan seiring berkembang pusat-pusat perdagangan, pelabuhan, serta kawasan perkotaan yang menjadi perkumpulan sosial dan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, prostitusi kemudian berkembang sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi informal yang tidak terlepas dari dinamika kehidupan perkotaan pada masa itu.

Praktik ini mulai muncul dengan seiring berkembang pusat-pusat perdagangan, pelabuhan, serta kawasan perkotaan yang menjadi perkumpulan sosial dan ekonomi. Dalam kondisi tersebut, prostitusi kemudian berkembang sebagai salah satu bentuk aktivitas ekonomi informal yang tidak terlepas dari dinamika kehidupan perkotaan pada masa itu. Kebijakan penutupan lokalisasi di indonesia menjadi langkah nasional dalam mengurangi eksploitasi seksual komersial serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Dengan adanya kebijakan ini memunculkan beberapa konsekuensi kepada masyarakat. Tantangan yang di hadapi juga mulai muncul dimana hilangnya mata penceharian utama serta perubahan strukur sosial dan stigma yang melekat pada masyarakat. Dalam hal ini regulasi serta dukungan yang tidak konsisten dari sebagian masyarakat juga menjadi faktor mendorong berkembangnya lokalisasi, dalam beberapa daerah menganggap bahwa lokalisasi dapat memeberikan manfaat dalam ekonomi sehingga warga dapat memperoleh pendapatan (Rahma et al., 2025).

Kota surabaya merupakan salah satu tempat prostitusi atau biasa disebut lokalisasi yang sudah melegenda, lokalisasi yang ada disebut dengan gang Dolly, kawasan Gang Dolly di Surabaya tepatnya di Jalan Kupang Gunung Timur I, Kelurahan Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Yang terdapat 3 Kecamatan dan 5 Kelurahan yaitu kelurahan morokrengan, kelurahan dupak, Kelurahan putat jaya, Kelurahan Kandangan Dan Kelurahan sememi. dulunya merupakan lokalisasi prostitusi terbesar se-Asia Tenggara yang resmi ditutup pada 18 Juni 2014 oleh Pemerintah kota Surabaya di bawah Wali Kota Tri Rismaharini. Larangan terhadap praktik prostitusi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008, khususnya pada Pasal 4 Ayat (2) huruf (d), yang menyatakan bahwa setiap orang tidak diperbolehkan menyediakan jasa pornografi dengan cara menawarkan atau mengiklankan layanan seksual, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada beberapa faktor mengapa praktik prostitusi ini bisa muncul di tengah masyarakat, Dalam banyak kasus, prostitusi berkembang karena tekanan ekonomi yang kuat, seperti kemiskinan yang membuat individu kesulitan memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Selain itu, keterbatasan lapangan pekerjaan dan tingginya angka pengangguran turut mendorong sebagian orang mencari jalan alternatif untuk bertahan hidup (Nisak & Suwanda, 2021).

Penutupan Lokalisasi Dolly dapat dipahami sebagai kebijakan yang sarat dilema, karena di satu sisi bertujuan memperbaiki tatanan sosial, namun di sisi lain membawa dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat sekitar. Kebijakan ini menimbulkan dampak yang signifikan secara ekonomi, mengingat bahwa warga selama ini dalam aktivikat ekonomi bergantung pada lokalisasi dolly, kondisi ini kemudian memicu penurunan kesejahteraan, karena tidak semua warga memiliki alternatif



pekerjaan dalam waktu singkat. Akibatnya, tekanan ekonomi meningkat dan berpotensi memengaruhi kualitas hidup keluarga, termasuk dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Secara sosial masyarakat yang sebelumnya menggantungkan hidup pada aktivitas di kawasan lokalisasi dihadapkan pada tuntutan untuk menyesuaikan diri dengan realitas sosial dan ekonomi yang baru.

Dari berbagai kelompok yang terdampak, anak-anak dari keluarga mantan pekerja lokalisasi menjadi salah satu yang paling rentan. Dalam situasi seperti ini, risiko putus sekolah semakin besar, bukan karena kurangnya keinginan untuk belajar, melainkan karena kondisi yang tidak memungkinkan (Ramadhani & Tohari, 2025). Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan kemampuan sekaligus membentuk karakter setiap individu. Pendidikan menjadi ruang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan akses pendidikan yang baik, masyarakat memiliki kesempatan untuk memperbaiki taraf hidup dan membuka peluang masa depan yang lebih luas. memperoleh pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang telah dijamin dalam Pasal 31 UUD 1945 (Diah Larasati et al., 2022). pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap masyarakat dapat mengakses pendidikan secara layak. Tidak hanya melalui penyediaan fasilitas belajar, tetapi juga melalui dukungan seperti program beasiswa yang dapat membantu mereka yang memiliki keterbatasan ekonomi.

Berdasarkan kondisi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Sosial melaksanakan Program Beasiswa Anak Asuh Eks Lokalisasi sebagai upaya untuk membantu anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang berasal dari keluarga terdampak penutupan lokalisasi. Program ini diharapkan dapat mencegah putus sekolah, memperluas akses pendidikan, dan menjadi bentuk perlindungan sosial bagi masyarakat yang mengalami tekanan ekonomi akibat perubahan kebijakan tersebut. Dengan demikian, beasiswa tidak hanya dipahami sebagai bantuan biaya pendidikan, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan untuk menjaga keberlanjutan masa depan anak-anak di wilayah eks lokalisasi. Walaupun program tersebut memiliki tujuan yang baik, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah kendala. Beberapa temuan menunjukkan bahwa bantuan belum sepenuhnya digunakan sesuai tujuan pendidikan, informasi mengenai program belum tersebar merata, dan masih ada stigma sosial terhadap penerima manfaat. Selain itu, koordinasi antar pihak pelaksana, kapasitas sumber daya manusia, dan sistem pengawasan juga masih perlu ditingkatkan agar program berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dan realisasi di lapangan, sehingga penting untuk dikaji lebih lanjut melalui analisis implementasi kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam bagaimana kebijakan penyaluran beasiswa anak asuh eks lokalisasi di Dinas Sosial Kota Surabaya diimplementasikan, serta faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberhasilan dan hambatannya. Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang menekankan enam aspek utama, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan pendekatan tersebut, penelitian diharapkan dapat



memberikan gambaran yang utuh mengenai efektivitas program sekaligus menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang

LANDASAN TEORI

Implementasi kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai proses di mana kebijakan yang telah dirumuskan dan disetujui dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), implementasi kebijakan melibatkan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh berbagai aktor untuk menerapkan kebijakan yang telah ditetapkan. Proses ini mencakup penentuan tujuan, pengalokasian sumber daya, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Implementasi kebijakan tidak selalu berjalan mulus, karena terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilannya. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dinamika implementasi sangat penting bagi perumusan kebijakan yang efektif.

Van Meter dan Van Horn (1975) mengemukakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh enam variabel utama yang saling berinteraksi. Variabel variabel ini adalah:

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Ukuran dan Tujuan Kebijakan Ukuran dan tujuan kebijakan merujuk pada seberapa jelas dan spesifik tujuan dari kebijakan yang dirumuskan. Kebijakan yang memiliki tujuan yang jelas dan terukur akan lebih mudah untuk diimplementasikan. Misalnya, dalam konteks Program Beasiswa Anak Asuh Eks Lokalisasi, tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan akses pendidikan bagi anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu dari keluarga yang terdampak penutupan lokalisasi. Tujuan yang jelas ini akan memudahkan pelaksana dalam merancang program dan menentukan indikator keberhasilan.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan kebijakan. Sumber daya yang dimaksud mencakup anggaran, personel, infrastruktur, dan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Jika sumber daya ini tidak memadai, maka implementasi kebijakan dapat terhambat. Misalnya, dalam Program Beasiswa, jika dana yang disediakan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pendidikan penerima, maka tujuan program tidak akan tercapai. Selain itu, sumber daya manusia yang terlatih dan kompeten juga sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dilaksanakan dengan baik.

3. Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi yang melaksanakan kebijakan, termasuk struktur organisasi, budaya kerja, dan kemampuan manajerial, mempengaruhi efektivitas implementasi. Organisasi yang memiliki struktur yang jelas, budaya kerja yang mendukung, dan manajemen yang baik cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan. Dalam konteks Dinas Sosial, keberadaan tim yang solid dan terlatih dalam pengelolaan program beasiswa akan mendukung kelancaran pelaksanaan kebijakan.

4. Komunikasi Antarorganisasi



Proses komunikasi yang efektif antara berbagai pihak yang terlibat dalam implementasi kebijakan sangat penting. Komunikasi yang baik dapat memastikan bahwa semua pihak memahami peran dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan kebijakan. Dalam pelaksanaan Program Beasiswa, komunikasi yang efektif antara Dinas Sosial, lembaga pendidikan, dan masyarakat penerima manfaat akan membantu dalam sosialisasi program dan memastikan bahwa informasi yang diperlukan tersampaikan dengan baik.

5. Disposisi Pelaksana

Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan juga berperan penting dalam keberhasilan implementasi. Pelaksana yang memiliki pemahaman yang baik tentang kebijakan dan berkomitmen untuk melaksanakannya akan lebih berhasil dalam mencapai tujuan kebijakan. Disposisi pelaksana mencakup tingkat pemahaman, tanggung jawab, dan motivasi mereka dalam melaksanakan kebijakan. Dalam Program Beasiswa, pelaksana yang memahami pentingnya pendidikan bagi anak-anak dari keluarga terdampak akan lebih termotivasi untuk menjalankan program dengan baik.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi lingkungan di mana kebijakan diimplementasikan dapat mempengaruhi hasilnya. Faktor-faktor seperti dukungan masyarakat, kondisi ekonomi, dan dinamika politik dapat mempengaruhi sejauh mana kebijakan dapat diterima dan dilaksanakan secara efektif. Dalam konteks Program Beasiswa, lingkungan sosial yang mendukung, seperti dukungan dari masyarakat dan orang tua, akan mempengaruhi keberhasilan program. Selain itu, kondisi ekonomi yang baik akan mendukung pelaksanaan program, sementara stigma sosial terhadap penerima manfaat dapat menjadi hambatan.

METODOLOGI

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini mencakup pendekatan kualitatif deskriptif yaitu dengan menggunakan teknik wawancara sebagai metode utama dalam memperoleh data dan informasi secara faktual mengenai bentuk proses implemenasi kebijakan beasiswa eks lokalisasi di wilayah kota surabaya Yang terletak di 3 kecamatan dan 5 kelurahan yaitu kelurahan morokrengan, kelurahan dupak, kelurahan putat jaya, kelurahan kandang dan kelurahan sememi, peneliti juga melakukan studi pustaka dengan meneliti berbagai sumber yang sudah ada, seperti buku, artikel, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan dan beasiswa. Sumber-sumber ini membantu memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tujuan dan cara pelaksanaan kebijakan tersebut.

Kajian ini menelaah mengenai efektivitas dalam pengadaan kebijakan beasiswa ekslokalisasi di wilayah surabaya khususnya putat jaya. dimana wilayah tersebut merupakan salah satu wilayah yang sebelumnya dikenal sebagai area lokalisasi, yang kemudian mengalami transformasi sosial pascapenutupan lokalisasi. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pihak terkait, aitu pegawai pemerintah yang mengelola program beasiswa dan pihak yang menerima beasiswa. Melalui wawancara ini, peneliti bisa mendengar langsung pengalaman dan pandangan mereka tentang program



beasiswa. Data yang diperoleh dari kedua metode ini kemudian akan dianalisis untuk menemukan pola dan tema yang relevan, sehingga penelitian ini dapat memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa efektif kebijakan beasiswa ini dan dampaknya bagi siswa serta masyarakat di Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Penyaluran Beasiswa Anak Asuh Eks Lokalisasi di Dinas Sosial Kota Surabaya menunjukkan berbagai temuan yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Untuk menganalisis temuan tersebut, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975) yang mencakup enam variabel, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik organisasi pelaksana, disposisi pelaksana, serta lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Keenam variabel tersebut digunakan sebagai kerangka analisis untuk menilai sejauh mana kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor pendukung dan hambatan yang muncul selama proses implementasi. Dengan demikian, hasil dan pembahasan penelitian disusun berdasarkan masing-masing variabel tersebut guna memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas pelaksanaan Kebijakan Penyaluran Beasiswa Anak Asuh Eks Lokalisasi di Kota Surabaya.

Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Berdasarkan dokumen dan hasil wawancara yang diperoleh, tujuan dari dibentuknya kebijakan beasiswa Eks lokalisasi Adalah sebagai bentuk bantuan Pendidikan kepada anakanak yatim, piatu, dan yatim piatu yang terdampak penutupan kawasan lokalisasi. Program ini merupakan bentuk kompensasi dari pemerintah kota Surabaya sebagai salah satu upaya mengurangi dampak sosial dan ekonomi serta sebagai wujud komitmen Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan akses pendidikan yang layak bagi anak-anak penerima manfaat. yang dirasakan oleh masyarakat pasca penutupan lokalisasi. Dalam wawancara, Ibu Mutina, salah satu wali dari penerima beasiswa, menjelaskan bahwa program ini telah ada selama enam tahun dan dirancang untuk membantu anak yatim dan piatu. Namun, meskipun tujuan ini sudah jelas, ada kesenjangan antara tujuan dan pelaksanaan. Banyak penerima yang mengutamakan kebutuhan sehari-hari dibandingkan pendidikan, sehingga bantuan yang diberikan tidak sepenuhnya dimanfaatkan untuk pendidikan.

Sumber Daya pelaksanaan Program Beasiswa Eks Lokalisasi didukung oleh ketersediaan sumber daya yang cukup memadai, baik dari segi anggaran, informasi, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil wawancara, dalam aspek sumber daya manusia, program ini melibatkan Dinas Sosial Kota Surabaya sebagai pelaksana program, serta bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Bangsa Surabaya Peduli (BSP) dalam pengelolaan dan penyaluran dana beasiswa kepada penerima manfaat.

Menurut informan dari Dinas Sosial Kota Surabaya, data penerima beasiswa merupakan data yang telah ditetapkan sejak masa kepemimpinan Wali Kota Tri



Rismaharini. Proses pendataan awal dilakukan melalui survei yang melibatkan pihak kelurahan, kecamatan, hingga Dinas Sosial, dalam penerima manfaat dari beasiswa merupakan anak yatim, piatu, atau yatim piatu yang berada di wilayah eks lokalisasi dan telah memenuhi kriteria yang ditentukan sejak awal program dilaksanakan. Dari aspek anggaran, sumber dana program berasal dari dana anak asuh yang sebelumnya dimiliki oleh pejabat Pemerintah Kota Surabaya dan kemudian dialihkan pengelolaannya kepada BSP dan BAZNAS. Dari hasil wawancara kepada pihak penerima beasiswa ibu mutina, wali dari penerima beasiswa menyebutkan bahwa setiap penerima memperoleh dana beasiswa sekitar Rp 690.000 per bulan.

Sebagian dana digunakan untuk kebutuhan harian anak, seperti uang makan dan uang saku, sedangkan sisanya disimpan dalam bentuk tabungan yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan pendidikan maupun diberikan kepada penerima setelah menyelesaikan Pendidikan. Selain itu ada dukungan sumber daya informasi melalui mekanisme pengajuan kebutuhan pendidikan yang telah ditetapkan. Penerima manfaat dapat mengajukan kebutuhan pendidikan kepada Dinas Sosial dengan melampirkan dokumen pendukung seperti kwitansi dan bukti pembayaran dari sekolah. Untuk menjaga akuntabilitas program, setiap penyaluran dana disertai dokumen pertanggungjawaban berupa kwitansi, daftar hadir, rincian nominal bantuan, dan dokumentasi kegiatan yang kemudian direkap dan dilaporkan kepada BAZNAS dan BSP sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dana program.

Komunikasi Antarorganisasi

Komunikasi yang efektif antara dinas sosial dan masyarakat penerima beasiswa ekslokalisasi adalah kunci untuk memastikan keberhasilan program tersebut. Hasil wawancara dengan penerima beasiswa menunjukkan bahwa informasi yang diberikan oleh dinas sosial, seperti tanggal pencairan dana, cukup jelas dan mudah dipahami. Namun, perlu ada upaya lebih lanjut untuk memastikan bahwa semua informasi penting disampaikan secara menyeluruh kepada masyarakat. Dinas sosial menggunakan platform media sosial, terutama Instagram, untuk menyebarkan informasi. Meskipun ini merupakan langkah positif, ada beberapa kendala yang muncul, seperti aksesibilitas, di mana tidak semua anggota masyarakat memiliki akses ke media sosial, terutama di daerah terpencil atau bagi kelompok masyarakat yang kurang terpapar teknologi. Mengandalkan satu platform saja membatasi jangkauan informasi.

Sebaiknya, dinas sosial mempertimbangkan penggunaan berbagai saluran komunikasi, seperti WhatsApp, SMS, dan pertemuan tatap muka, untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas. Selain itu, dinas sosial perlu menciptakan saluran untuk menerima umpan balik dari penerima beasiswa. Dengan mendengarkan pengalaman dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, dinas dapat memperbaiki program dan komunikasi di masa mendatang. Umpan balik juga membantu dinas sosial untuk memahami apakah informasi yang disampaikan sudah diterima dengan baik atau masih ada yang perlu diperbaiki. Penting juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program beasiswa dan manfaatnya melalui kampanye edukasi, seminar, atau workshop, serta penggunaan materi visual yang mudah dipahami. Dengan memperluas



saluran komunikasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi, diharapkan semua masyarakat dapat mendapatkan manfaat dari program beasiswa ini secara maksimal.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Program beasiswa eks-lokalisasi memiliki tujuan yang jelas dan sumber daya yang tersedia untuk mencapai keberhasilan. Dalam wawancara, salah satu petugas dinas sosial mengungkapkan bahwa mereka memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk membantu anak-anak, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan efektivitas program. Namun, meskipun ada niat baik dan sumber daya yang memadai, pelaksana program menghadapi tantangan besar karena kurangnya pelatihan. Pelaksana program beasiswa perlu dilengkapi dengan keterampilan dan pengetahuan yang tepat untuk dapat menjalankan program dengan efektif. Tanpa pelatihan yang memadai, mereka mungkin tidak sepenuhnya memahami cara terbaik untuk mendukung penerima beasiswa dan mengelola program secara keseluruhan. Pelatihan dapat mencakup berbagai aspek, seperti manajemen program, komunikasi efektif, dan teknik pendampingan untuk penerima beasiswa. Dengan pelatihan yang tepat, pelaksana dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan yang muncul dan dapat memberikan dukungan yang lebih baik kepada anak-anak yang mereka bantu. Dengan adanya pelatihan, pelaksana program dapat meningkatkan keterampilan interpersonal mereka, yang sangat penting dalam berinteraksi dengan penerima beasiswa dan masyarakat.

Keterampilan komunikasi yang baik akan membantu mereka menyampaikan informasi dengan lebih efektif dan membangun hubungan yang kuat dengan penerima beasiswa. Selain itu, pelatihan juga dapat meningkatkan pemahaman pelaksana tentang kebutuhan spesifik anak-anak penerima beasiswa. Dengan memahami latar belakang dan tantangan yang dihadapi oleh anak-anak, pelaksana dapat merancang intervensi yang lebih tepat sasaran dan relevan. Peningkatan pelatihan bagi pelaksana tidak hanya akan membantu dalam meningkatkan efektivitas program beasiswa, tetapi juga akan berkontribusi pada keberlanjutan program itu sendiri. Pelaksana yang terlatih dengan baik akan lebih mampu mengidentifikasi masalah yang mungkin timbul dan mencari solusi yang inovatif. Selain itu, pelaksana yang merasa didukung melalui pelatihan akan lebih termotivasi untuk berkontribusi secara aktif dalam program, yang akan berdampak positif pada pencapaian tujuan program beasiswa.

Dinas sosial dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan atau organisasi non-pemerintah untuk menyusun program pelatihan yang komprehensif bagi pelaksana. Program ini dapat mencakup modul-modul tentang manajemen program, teknik pengajaran, serta pengembangan keterampilan sosial dan emosional. Selain itu, pelatihan berkelanjutan juga penting untuk memastikan bahwa pelaksana tetap up-to-date dengan praktik terbaik dan inovasi terbaru dalam bidang pendidikan dan dukungan sosial. Dengan adanya pelatihan yang memadai bagi pelaksana program beasiswa eks-lokalisasi, diharapkan efektivitas program dapat meningkat secara signifikan. Pelaksana yang terlatih tidak hanya akan mampu memberikan dukungan yang lebih baik kepada anak-anak, tetapi juga akan berkontribusi pada keberhasilan jangka panjang dari program ini. Oleh karena itu, investasi dalam pelatihan pelaksana merupakan langkah yang sangat penting untuk mencapai tujuan program beasiswa.



Disposisi Pelaksana

Berdasarkan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), disposisi pelaksana merupakan salah satu aspek penting yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan dengan sikap, komitmen, tanggung jawab, serta dukungan pelaksana dalam menjalankan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa disposisi pelaksana dalam Program Penyaluran Beasiswa Anak Asuh Eks Lokalisasi di Dinas Sosial Kota Surabaya tergolong baik. Hal ini ditunjukkan melalui komitmen Dinas Sosial dalam memastikan bantuan digunakan sesuai dengan tujuan pendidikan melalui penerapan prosedur administrasi dan sistem pengawasan yang terstruktur.

Sikap positif pelaksana juga terlihat dari pelayanan yang diberikan kepada penerima manfaat. Pelaksana menunjukkan sikap responsif, komunikatif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur program serta membantu menyelesaikan berbagai kendala yang dihadapi penerima manfaat. Selain itu, Dinas Sosial bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) secara berkelanjutan melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap mekanisme penyaluran bantuan guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan program.

Secara keseluruhan, disposisi pelaksana memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan implementasi kebijakan. Tingginya komitmen, rasa tanggung jawab dalam pengelolaan bantuan, kemampuan dalam mengatasi berbagai permasalahan, serta keterbukaan terhadap proses evaluasi menjadi faktor yang mendukung tercapainya tujuan program, yaitu memperluas akses pendidikan dan menjamin keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu dari keluarga eks lokalisasi di Kota Surabaya.

Faktor Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Menurut teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Dalam implementasi Program Penyaluran Beasiswa Anak Asuh Eks Lokalisasi di Dinas Sosial Kota Surabaya, ketiga aspek tersebut menjadi faktor pendukung yang berperan penting dalam mencapai tujuan program, khususnya bagi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang terdampak penutupan kawasan eks lokalisasi. Jika dilihat dari sisi sosial, program memperoleh respons dan dukungan yang positif dari masyarakat serta keluarga penerima manfaat. Meskipun kondisi sosial penerima beragam, Dinas Sosial mampu menerapkan strategi komunikasi yang sesuai sehingga informasi mengenai program dapat dipahami dengan baik. Dari sisi ekonomi, program ini hadir sebagai upaya membantu keluarga yang memiliki keterbatasan finansial dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak. Bantuan yang diberikan tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga, tetapi juga mendukung pemenuhan kebutuhan pendidikan serta meningkatkan semangat belajar penerima manfaat.

Sedangkan jika dilihat pada aspek politik, dukungan pemerintah daerah terlihat melalui penyediaan regulasi, koordinasi antarinstansi, serta komitmen dalam menjaga keberlangsungan program. Selain itu, proses penentuan penerima bantuan dilakukan



secara cermat dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi calon penerima agar bantuan dapat diberikan secara tepat sasaran. Dengan adanya dukungan dari lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, implementasi Program Penyaluran Beasiswa Anak Asuh Eks Lokalisasi dapat terlaksana secara efektif serta memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan akses pendidikan dan kesejahteraan anak-anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang terdampak eks lokalisasi di Kota Surabaya.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn (1975), dapat disimpulkan bahwa implementasi Kebijakan Penyaluran Beasiswa Anak Asuh Eks Lokalisasi di Dinas Sosial Kota Surabaya telah terlaksana dengan cukup baik. Program ini dirancang untuk mendukung keberlanjutan pendidikan anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang terdampak penutupan kawasan eks lokalisasi di Kota Surabaya. Dari aspek ukuran dan tujuan kebijakan, program telah memiliki sasaran yang jelas serta mampu memberikan manfaat bagi penerima manfaat, meskipun masih ditemukan penggunaan bantuan yang belum sepenuhnya difokuskan untuk kebutuhan pendidikan. Dari aspek sumber daya, pelaksanaan program didukung oleh ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, serta kerja sama antara Dinas Sosial Kota Surabaya, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Bangga Surabaya Peduli (BSP) yang berperan dalam mendukung kelancaran penyaluran bantuan.

Pada aspek komunikasi antarorganisasi, koordinasi antara Dinas Sosial, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Bangga Surabaya Peduli (BSP), pemerintah kelurahan, sekolah, dan penerima manfaat telah berjalan dengan baik sehingga informasi program dapat tersampaikan secara efektif. Karakteristik organisasi pelaksana juga menunjukkan adanya pembagian tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, disposisi atau sikap pelaksana tergolong baik yang ditunjukkan melalui komitmen, tanggung jawab, responsivitas, serta pelayanan yang komunikatif kepada penerima manfaat. Faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga memberikan dukungan terhadap keberhasilan program. Dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah berperan penting dalam mendorong keberlanjutan pendidikan penerima manfaat, sementara bantuan yang diberikan mampu membantu meringankan beban ekonomi keluarga.

Meskipun demikian, penelitian ini masih menemukan beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan, seperti terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai mekanisme program, pemanfaatan bantuan yang belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan pendidikan, serta kondisi sosial dan ekonomi keluarga penerima yang beragam. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi program, penguatan pendampingan kepada penerima manfaat, serta optimalisasi pengawasan penggunaan bantuan agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, implementasi Kebijakan Penyaluran Beasiswa Anak Asuh Eks Lokalisasi telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses pendidikan serta membantu mengurangi beban ekonomi anak yatim, piatu, dan yatim piatu yang terdampak eks lokalisasi di Kota Surabaya.



DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. (2008). *Validitas dan Reliabilitas Dalam Penelitian Kualitatif*.
- Basyasyah, N., & Ratyaningrum, F. (2021). EKSISTENSI RUMAH BATIK PUTAT JAYA SURABAYA. In *Jurnal Seni Rupa* (Vol. 9, Number 3).
<http://e/journal.unesa.ac.id/index.php/va>
- Dewi, C. A., Wulandari, Y. P., Sunan, U., & Surabaya, A. (2025a). EKSISTENSI KAMPUNG DOELLYNAN DALAM MEMBANGUN LITERASI ANAK-ANAK DI RW 12 KELURAHAN PUTAT JAYA. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3, 29–37.
<https://doi.org/10.62017/jpmi>
- Dewi, C. A., Wulandari, Y. P., Sunan, U., & Surabaya, A. (2025b). Eksistensi Kampung Doellynan Dalam Membangun Literasi Anak-Anak di RW 12 Kelurahan Putat Jaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 3, 29–37. <https://doi.org/10.62017/jpmi>
- Diah Larasati, A., Dinda, D., Aidah, N. A., Gustiputri, R., Neisya, S., & Isyak, R. (2022). Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Di Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan*, 5(1), 1–22.
- Fikri, M. H., Murhayati, S., & Darmawan, R. (2025). *Kebebasan Data dalam Penelitian Kualitatif*.
- Hermawan, S., Chinthia, I., Jauwena, S., Thiopelus, B., & Wyet, C. (2022). Program Kemitraan Masyarakat (PKM)Eks-Lokalisasi Dolly di Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan Surabaya. *SHARE “SHaring - Action - REflection,”* 8(1), 17–25.
<https://doi.org/10.9744/share.8.1.17-25>
- Luthfiyan Wahidah Putri, & Murhayati Sri. (2015). Strategi Memastikan Keabsahan Data Dalam Penelitian Kualitatif. *Imaji*, 13(1). <https://doi.org/10.21831/imaji.v13i1.4044>
- Nisak, K., & Suwanda, I. made. (2021). Strategi Pemerintah Kota Surabaya Dalam Menutup Praktik Prostitusi Di Lokalisasi Dolly. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 09(1), 158–172.
- Ramadhani, R., & Tohari, A. (2025). Analisis Program Beasiswa Bantuan Operasional Pendidikan Ekslokalisasi melalui Penyaluran Bantuan di Kelurahan Putat Jaya. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial*, 6(3), 520–528.
<https://doi.org/10.53299/diksi.v6i3.2609>
- Sevrina, G. I. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi di Indonesia. *Law and Justice*, 5(1), 17–29. <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.9216>
- Susanto Dedi, Risnita, & Jailani Syahrani .M. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*.
<http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>



- Taofik, T., & Wangid, M. N. (2022). Hubungan lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah berbasis agama terhadap prestasi belajar siswa. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*, 8(1), 136. <https://doi.org/10.29>
- Praktik Prostitusi Di Lokalisasi Dolly. *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan*, 09(1), 158–172.
- Ramadhani, R., & Tohari, A. (2025). Analisis Program Beasiswa Bantuan Operasional Pendidikan Ekslokalisasi melalui Penyaluran Bantuan di Kelurahan Putat Jaya. *DIKSI: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Sosial*, 6(3), 520–528. <https://doi.org/10.53299/diksi.v6i3.2609>
- Sevrina, G. I. (2020). Kebijakan Kriminalisasi Praktik Prostitusi di Indonesia. *Law and Justice*, 5(1), 17–29. <https://doi.org/10.23917/laj.v5i1.9216>
- Susanto Dedi, Risnita, & Jailani Syahrani .M. (2023). *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah*. <http://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/qosim>
- Taofik, T., & Wangid, M. N. (2022). Hubungan lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah berbasis agama terhadap prestasi belajar siswa. *JPPI (Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia)*,8(1),136.<https://doi.org/10.292>

